

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA PERIODE 2000-2022

Oleh

UKHTI CIPTAWATY

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang dengan persentase 8,47% dari total populasi. Rendahnya standar kemiskinan di Indonesia menuntut pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan melalui program bantuan non-tunai dan tunai. Disertasi bertujuan untuk menganalisis pengaruh program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada aspek pendapatan dan pengeluaran penduduk miskin di Indonesia selama dua dekade terakhir (2000–2022). Penelitian menggunakan pendekatan *Threshold Model Least*. Penelitian mencakup 34 provinsi dengan data sekunder dari BPS dan sumber resmi lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan analisis pengaruh BPNT dan PKH terhadap pendapatan dan pengeluaran. Perbedaan menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikansi pengaruh antar provinsi. Pada Kuadran I, terdapat 6 provinsi yang memiliki pengaruh positif dari kedua program dalam aspek pendapatan, yakni Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Papua, dan Gorontalo, sedangkan di aspek pengeluaran terdapat 4 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kuadran II berisi 10 provinsi dengan BPNT berpengaruh pada pendapatan tetapi PKH tidak berpengaruh, termasuk Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Bali, sementara di sisi pengeluaran ada 2 provinsi, yaitu Riau dan Sulawesi Selatan. Kuadran III terdiri dari 4 provinsi yang menunjukkan pengaruh PKH pada pendapatan tanpa didukung BPNT, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Terakhir, Kuadran IV mencakup 20 provinsi di mana kedua program tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan, termasuk Aceh, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Pada aspek pengeluaran terdapat 26 provinsi yang menunjukkan tidak adanya pengaruh BPNT dan PKH. Beberapa provinsi merasakan efek positif kedua program namun banyak wilayah lain belum merasakan dampak signifikan sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan agar manfaat bantuan sosial dapat dirasakan lebih optimal dalam pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia.

Kata kunci: Kemiskinan, *Threshold*, BPNT, PKH.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF POVERTY ALLEVIATION PROGRAMS IN INDONESIA PERIOD 2000 - 2022

By

UKHTI CIPTAWATY

One indicator of government success is a decline in the number of people living in poverty. According to the latest data from the Central Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik/BPS) in March 2025, the number of poor people in Indonesia reached 23.85 million, representing 8.47% of the total population. The low poverty line in Indonesia demands that the government continue to improve equitable welfare through non-cash and cash assistance programs. This dissertation aims to analyze the influence of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) and the Family Hope Program (PKH) on the income and expenditure aspects of the poor population in Indonesia over the last two decades (2000–2022). The study uses a Threshold Model Least approach and covers 34 provinces with secondary data from BPS and other official sources.

The results show significant variation in the impact of BPNT and PKH on income and expenditure among provinces. In Quadrant 1, six provinces showed a positive influence from both programs on income, including Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Papua, and Gorontalo; and four provinces showed the same on expenditure: Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, and Sulawesi Tenggara. Quadrant 2 contains ten provinces where BPNT influences income, but PKH does not, such as Sumatera Barat, Jawa Barat, and Bali, while Riau and Sulawesi Selatan show influence on expenditure. Quadrant 3 consists of four provinces showing PKH impacting income without BPNT influence, like Kepulauan Bangka Belitung and DKI Jakarta. Lastly, Quadrant 4 comprises 20 provinces where neither program influences income significantly, including Aceh, Jawa Tengah, and Kalimantan Timur. On the side of expenditure 26 provinces are neither influenced by BPNT nor PKH.

This analysis highlights that while BPNT and KPM have positive effects in some regions, many areas have not yet felt significant impacts, indicating the need for policy adjustments and strengthening, especially in provinces within Quadrant 4, to ensure these social assistance programs maximize their effectiveness in reducing poverty across Indonesia.

Keywords: Poverty, Threshold, BPNT, PKH.